

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

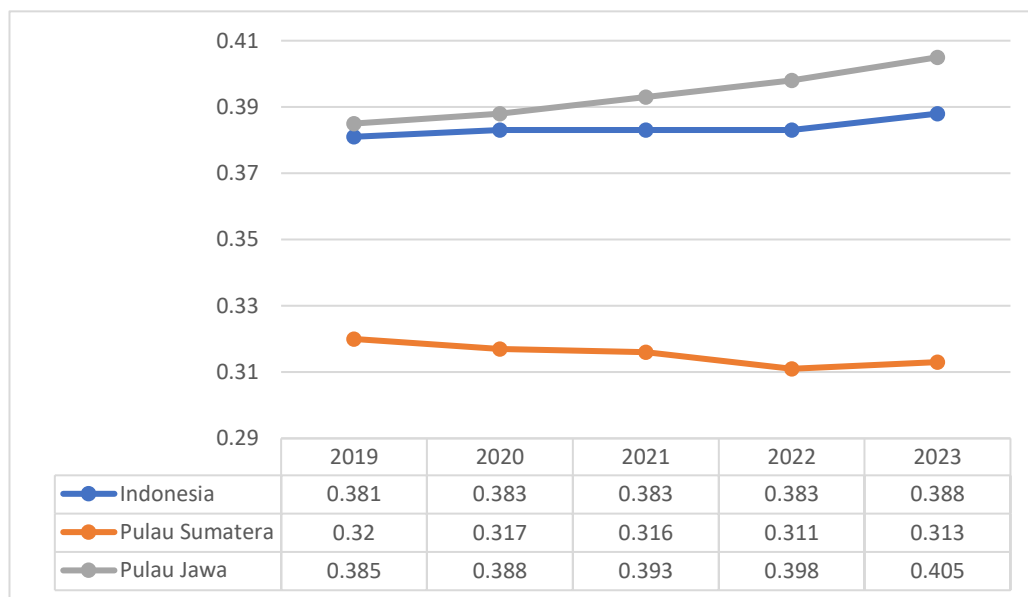
Permasalahan yang sering dihadapi dalam pembangunan adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (Tambunan, 2021) Pembangunan ekonomi adalah suatu proses pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu panjang dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Kuncoro, 2020).

Pulau Jawa dan Pulau Sumatera merupakan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di bagian barat dan memiliki tingkat populasi penduduk yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia Tengah dan Timur. Sebagai pusat pemerintahan pembangunan di pulau jawa sangat maju dan cepat dibandingkan pulau lainnya, termasuk jika dibandingkan dengan Pulau Sumatera. Faktanya bahwa Pulau Sumatera menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah daripada Pulau Jawa memberikan titik fokus yang menarik untuk penelitian lebih lanjut. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Candra Mustika, Rahma Nurjanah, 2023) menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rata-rata di pulau Sumatera sebesar 0,327, yang secara signifikan lebih rendah daripada di Pulau Jawa sebesar 0,393. Fenomena ini memberikan tantangan menarik untuk di pelajari lebih dalam.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi. Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan diterima masyarakat tidak merata (Mustika, 2022). Kondisi demografi yang dimaksud meliputi perbedaan infrastruktur, tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki daerah bersangkutan (Marzuki, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Apabila nilai Indeks Gini mencapai 0 (nol) itu mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan sangat merata atau "kemerataan sempurna". Di sisi lain, jika nilai Indeks Gini mencapai 1 (satu), hal itu menunjukkan adanya "ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna.". Intinya, semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dalam suatu negara tidak merata atau timpang. Sebaliknya, semakin rendah nilai Indeks Gini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Dikatakan ketimpangan taraf rendah apabila Indeks Gini kurang dari 0,35, sedangkan ketimpangan taraf sedang apabila saat Indeks Gini berada dalam kisaran 0,35 hingga 0,5. Ketimpangan taraf tinggi apabila ketika Indeks Gini melebihi 0,5.

Gambar 1.1 Indeks Gini Provinsi di Indonesia, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa (Persen) Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Penelitian ini menyoroti perbedaan ketimpangan pendapatan pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Secara umum, nilai indeks Gini di Pulau Jawa tersebut masuk dalam kategori ketimpangan sedang, dengan nilai rata-rata indeks Gini berada pada rentang 0,4-0,5. Meskipun termasuk dalam kategori sedang, namun indeks gini Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Sumatera dan

bahkan lebih tinggi dari indek Gini Indonesia selama 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Berdasarkan data gambar di atas, Pulau Sumatera selalu memiliki ketimpangan rendah meskipun memiliki 10 (sepuluh) provinsi dibandingkan Pulau Jawa yang hanya memiliki 6 (enam) provinsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah provinsi yang banyak belum tentu mempengaruhi ketimpangan pendapatan daerah.

Dapat dilihat bahwa pada masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada rentang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, indeks Gini Pulau Sumatera dan indeks Gini Pulau Sulawesi cenderung mengalami penurunan senilai -0,55% dan -0,78%, sedangkan Pulau Jawa secara terus menerus semakin naik senilai 1,29%. Maka, ketimpangan pendapatan daerah di Pulau Jawa masih perlu diturunkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar lebih baik secara merata. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa suatu daerah memiliki kesenjangan yang tinggi jika terdapat banyak orang miskin. Dengan demikian, ada juga berpendapat bahwa dengan adanya kesenjangan yang tinggi karena adanya sekelompok orang kaya di tengah-tengah masyarakat yang umumnya masih miskin.

Menurut Kuncoro (2020), ketimpangan pendapatan adalah standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Kesenjangan pendapatan menjadi tanda bahwa distribusi pendapatan di suatu wilayah tidak tersebar secara merata. Pendapatan cenderung dinikmati oleh kelompok kaya, sementara kelompok miskin hanya menikmati pendapatan dalam jumlah sedikit.

Dengan adanya pembangunan diharapkan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pembangunan memegang peran sentral dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maupun negara secara keseluruhan (bappeda.go.id). Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai proses pembangunan fisik semata, juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dasar, serta penguatan struktur ekonomi masyarakat. Meningkatnya kualitas dan cakupan pembangunan, masyarakat memperoleh peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan adanya pembangunan diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan, diharapkan terjadi perbaikan signifikan terhadap taraf hidup masyarakat, dari sisi pendapatan, akses terhadap layanan publik, maupun kesempatan kerja yang lebih luas. Dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat dari adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu menjawab permasalahan ini. Sebuah keberhasilan dari adanya pembangunan ekonomi dapat membantu perekonomian masyarakat, meningkatkan jumlah pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan (Amani, 2022)

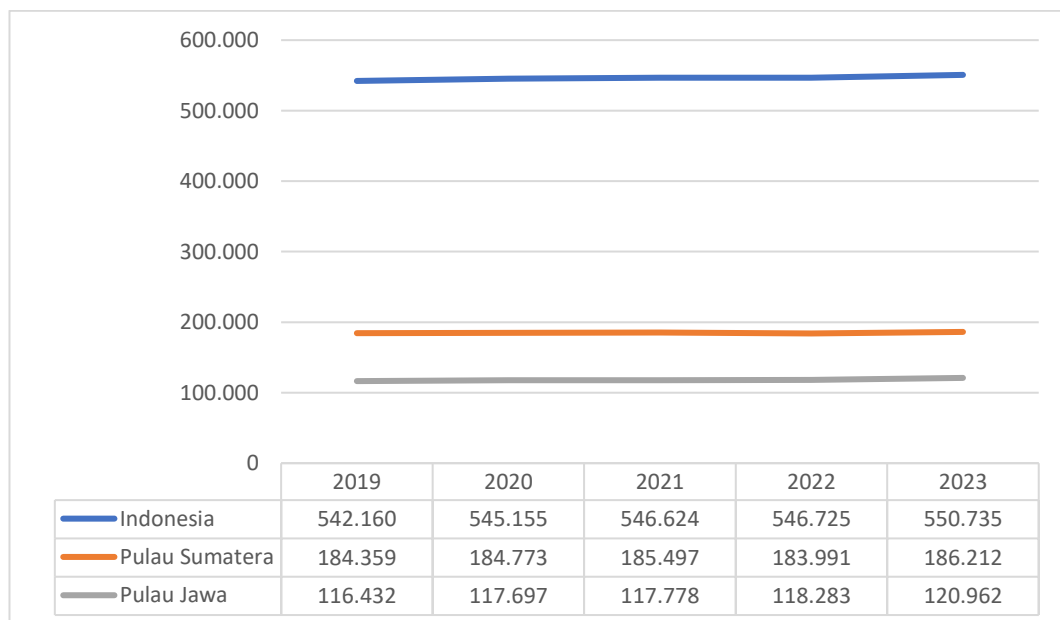
Panjang jalan yang terbentang di suatu wilayah sering dianggap sebagai indikator utama dalam mengevaluasi tingkat infrastruktur. Jumlah jalan yang baik dan terkoneksi dengan baik dapat mencerminkan tingkat aksesibilitas, konektivitas, dan kemajuan ekonomi suatu wilayah. Semakin panjang jaringan jalan tersedia, semakin baik pula potensi untuk mengakses layanan publik, pasar, serta kesempatan ekonomi dan sosial lainnya. Oleh karena itu, panjang jalan sering menjadi tolak ukur penting dalam menilai tingkat pengembangan infrastruktur suatu daerah.

Infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan kelancaran distribusi aliran barang salah satunya adalah jalan, jalan merupakan salah satu infrastruktur yang paling sering digunakan untuk suatu wilayah agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Beberapa hasil penelitian yang mengkaitkan ketersediaan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan menunjukkan bahwa stabilitas pembangunan infrastruktur sangat penting bagi aktivitas usaha. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, sarana gedung dan air bersih mengurangi jumlah penderita sakit, meningkatkan fasilitas infrastruktur dapat menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mencapai pemerataan di Indonesia (ADLI, 2018).

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan peningkatan bertahap dalam infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan panjang jalan di Indonesia. Pulau Sumatera memperlihatkan peningkatan signifikan dalam panjang jalan pada tahun 2023 (186.212 km), sementara Pulau Jawa juga memperlihatkan peningkatan tahun yang sama (120.962 km).

Meskipun demikian, total panjang jalan di Indonesia pada tahun 2022 (550.735 km) menunjukkan peningkatan konsisten seiring berjalannya waktu. Dalam konteks tingkat kewenangan pemerintahan, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan juga tercermin dalam peningkatan panjang jalan di kedua tingkat kewenangan pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Gambar 1.2 Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintah (km) di Indonesia, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa (Persen) Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain faktor infrastruktur, ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Tujuan pengeluaran pemerintah antara lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer” dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan lain sebagainya.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan tergantung pada rencana kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Astary, 2024). Di negara manapun, selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintahan yang dalam peraturan ekonomi negerinya berperan semata-mata hanya sebagai “wasit” atau “polisi”, yang hanya berfungsi membuat undang-undang dan peraturan, untuk kemudian menjadi pelepas jika timbul masalah atau penyelamat bila terjadi kepanikan.

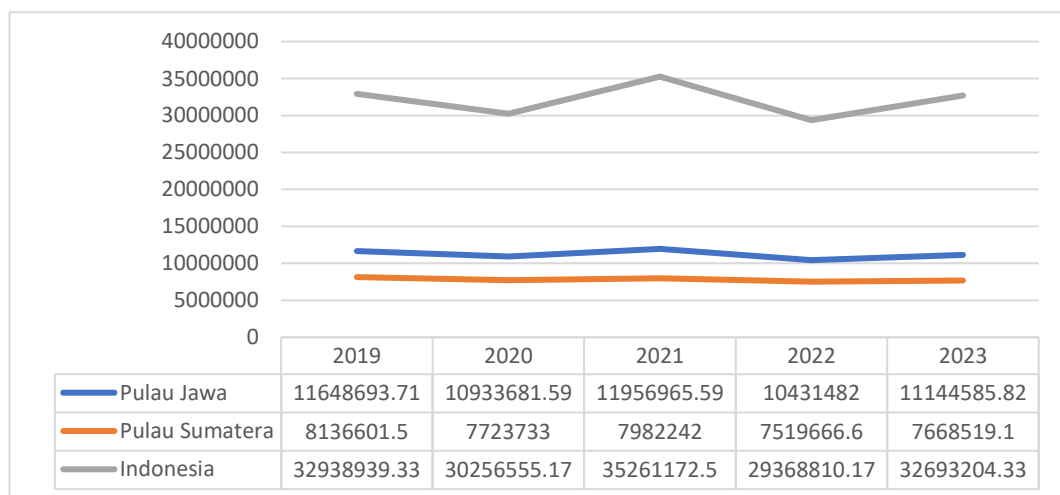
Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan, mustahil untuk dicegah. Tidak ada satu pun perekonomian, termasuk negara kapitalis atau negara maju, bebas dari intervensi pemerintahnya. Yang ada ialah perbedaan kadarnya. Dibeberapa negara pemerintahnya terlibat erat dalam perekonomian, sementara di negara-negara lain campur tangan pemerintah dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas.

Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. Pengeluaran pemerintah atau disebut belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang (Mustika, 2022).

Pengeluaran Pemerintah dapat bersifat “exhaustive” yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi, di samping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat “transfer” saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah (Astuti, 2018). Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen untuk mengatasi kemiskinan yang ada dinegara kita.

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat rata-rata belanja pemerintah di Pulau Jawa lebih besar dibandingkan dengan Pulau Sumatera. Rata-rata belanja pemerintah di Pulau Jawa pada tahun 2023 adalah 11.144.585,82 Juta Rupiah, pada Pulau Sumatera sebesar 7.668.519,1 Juta Rupiah, dan di Indonesia sebesar 32.693.204,33 Juta Rupiah. Pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Ini bukan berarti pemerintah ikut berbisnis, melainkan pemerintah harus berkontribusi menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum.

Gambar 1.3 Rata-Rata Belanja Pemerintah di Indonesia, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Ketimpangan pendapatan merupakan isu fundamental yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi hasil-hasil pembangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi apabila tidak ditangani secara serius. Oleh karena itu, dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan, aspek ketimpangan pendapatan harus menjadi salah satu perhatian utama bagi para pembuat kebijakan.

Peran pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pendapatan sangatlah dibutuhkan. Dalam menetapkan kebijakan, pemerintah perlu memperhatikan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah sosial terutama pada pendistribusian pendapatan. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah yang menyampingkan permasalahan ketimpangan pendapatan akan berdampak pada kecemburuan sosial dan juga berimbas pada ketidakstabilan ekonomi. Badriah (2019) menyimpulkan bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan yaitu dapat melalui cara penetapan kebijakan pemerintah yang ditujukan salah satunya pada tunjangan finansial dan barang maupun jasa konsumsi.

Keberhasilan pemerintah dalam membuat kebijakan akan mampu memberi keuntungan pada berbagai kalangan, apalagi kebijakan tersebut dapat mendorong kegiatan di suatu wilayah. Maka, hal ini dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat. Dimana bagi pemerintah, kegiatan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan dari pajak. Sementara, bagi masyarakat, adanya suatu kegiatan diharapkan mampu untuk menarik investasi sehingga penyerapan tenaga kerja terbuka dan kesejahteraan dapat meningkat.

Tidak meratanya alokasi pengeluaran pemerintah ke berbagai wilayah bisa menjadi salah satu sebab dari ketimpangan pendapatan. Perbedaan pengalokasian pengeluaran pemerintah ini dapat dikarenakan kondisi setiap wilayah yang berbeda. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terjalin dengan baik supaya tepatnya sasaran pengalokasian pengeluaran pemerintah sehingga adanya perbaikan masalah ketimpangan pendapatan.

Kebijakan yang dirancang dan dijalankan secara tepat oleh pemerintah memiliki peranan strategis menanggulangi permasalahan ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Sebagai instrumen utama dalam pengelolaan perekonomian, kebijakan publik yang diarahkan untuk menciptakan keadilan distribusi dapat menjadi katalisator tercapainya kesejahteraan yang lebih merata. Melalui mekanisme redistribusi, seperti sistem perpajakan progresif, pemberian subsidi atau bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, serta peningkatan investasi di sektor publik seperti infrastruktur dan pendidikan, pemerintah dapat mempersempit kesenjangan antar kelompok pendapatan.

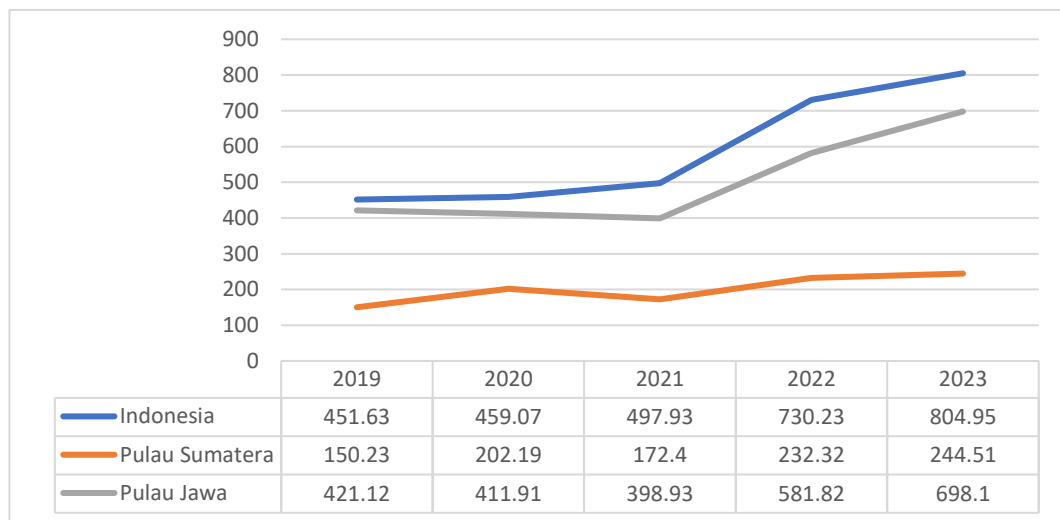
Tantangan yang ada perlu diatasi melalui reformasi kebijakan dan peningkatan transparansi, agar tujuan mengurangi ketimpangan dapat tercapai secara berkelanjutan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahman & Putri (2021) menunjukkan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi merugikan ketimpangan. Pemahaman terhadap hubungan antara kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan masih dalam tahap awal, sehingga belum banyak masyarakat yang memahami apakah kebijakan tersebut juga akan berdampak pada ketimpangan pendapatan atau tidak.

Menurut Anggi Kurnianingsih (2021), investasi didefinisikan sebagai penggunaan yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal terdiri dari paprik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses-proses produksi. Investasi juga dapat didefinisikan sebagai pengeluaran oleh sektor produsen untuk pembelian barang. Investasi yang terjadi disuatu Negara terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta.

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu: investasi pada *financial assets* dan investasi pada *real assets*. Investasi pada *financial assets* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real assets* diwujudkan dalam bentuk pembelian *assets* produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya.

Investasi pemerintah dapat dijalankan melalui salah satu instrument kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah untuk investasi sedangkan investasi swasta berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Dengan adanya investasi lowongan pekerjaan terbuka, sehingga kemiskinan berkurang. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, masyarakat mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, perkembangan investasi mengurangi jumlah masyarakat berada dibawah garis kemiskinan (Atmodjo, 2021).

Gambar 1.4 Investasi di Indonesia, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa (dalam Triliun Rupiah) Tahun 2019-2023



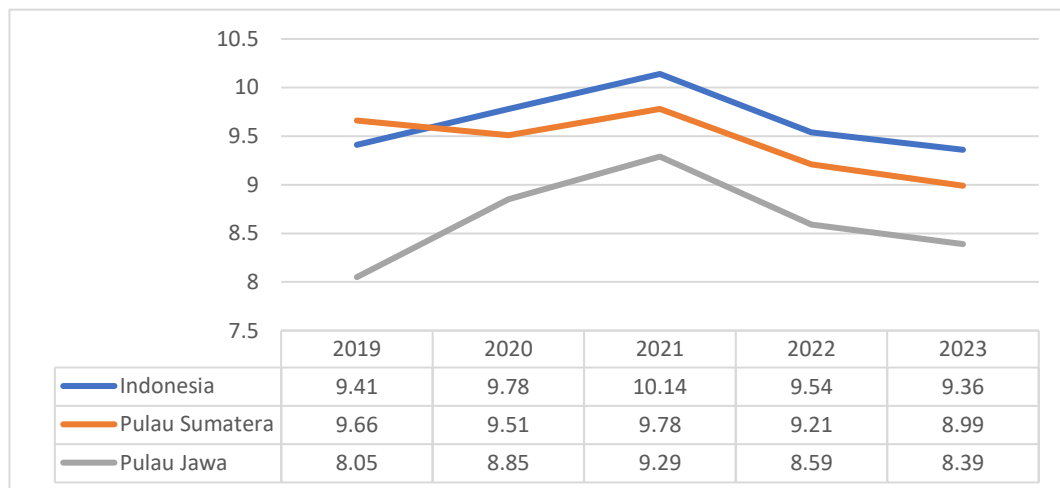
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan Gambar 1.4 yang berisi data dari Badan Pusat Statistik terlihat bahwa investasi di Indonesia, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa cenderung mengalami peningkatan dimulai dari investasi yang bernilai miliaran pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Meskipun Pulau Jawa memiliki nilai investasi tertinggi pada Tahun 2023 senilai 698,1 triliun rupiah dibandingkan dengan Pulau Sumatera senilai 244,51 triliun rupiah, namun rata-rata pertumbuhannya tidak demikian. Pulau Sumatera memiliki rata-rata nilai investasi tertinggi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yaitu senilai 25%, sedangkan Pulau Jawa hanya senilai 12%.

Faktanya, saat berlangsungnya pandemi Covid-19 tidak menurunkan minat investor domestik dan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Diantara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, hanya investasi Pulau Jawa yang turun -2% pada Tahun 2020 sebelum kembali meningkat tajam senilai 69% pada Tahun 2023. Sedangkan Pulau Sumatera terus naik sampai dengan Tahun 2023. Namun, meskipun investasi tersebut cenderung meningkat, secara ontologi selama masa Pandemi Covid-19, banyak bisnis seperti pusat perbelanjaan yang memberhentikan karyawannya sehingga meningkatkan kemiskinan. Meningkatnya jumlah penduduk miskin ini

dikhawatirkan akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kemiskinan pula. Tingkat kemiskinan di suatu daerah dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Semakin besar tingkat kemiskinan di suatu daerah berarti menurunkan tingkat produktivitas dan akan memicu penurunan pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan daerah lain mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan. (Yusica, 2018).

Gambar 1.5 Rata-Rata Persentase Kemiskinan di Indonesia, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa (Persen) Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari Gambar 1.5 menjelaskan perbedaan tingkat kemiskinan diantara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa tahun 2019-2023. Dilihat dari nilainya, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Pulau Jawa sebesar 8,39 %, sedangkan di Pulau Jawa 8,99 %. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah persentase penduduk miskin yang berangsur menurun salah satunya ialah sudah meluasnya lapangan pekerjaan yang mulai merambah ke daerah pelosok-pelosok sehingga pendapatan yang di dapat mulai meningkat. Beberapa aspek seperti menguatnya memperbaiki infrastruktur, kebijakan pemerintah, investasi, perbaikan kualitas hidup masyarakat amat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan diperlukan untuk mencapai masyarakat sejahtera secara berkeadilan.

Namun hal ini bertolak belakang dengan perbedaan fenomena ketimpangan pendapatan daerah yang terjadi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa di Indonesia meskipun dari kedua pulau tersebut sama-sama menunjukkan bahwa Infrastruktur membaik, pengeluaran pemerintah, kebijakan pemerintah, investasi terus meningkat, dan tingkat kemiskinan cenderung menurun secara fluktuatif. Hal ini dibuktikan dari menurunnya tingkat kenaikan rasio gini pada rentang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 di Pulau Sumatera senilai -0,55% sedangkan Pulau Jawa terus menerus naik senilai 1,29% atau berada di atas kenaikan rasio gini Indonesia yang hanya senilai 0,46%.

Adapun maksud penulis membandingkan kedua pulau tersebut dikarenakan pulau-pulau besar lain di Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua memiliki daerah pemekaran yang masih sangat muda, sehingga data rentang waktu diperlukan untuk hasil kajian yang akurat tidak terpenuhi terutama untuk regresi data panel dalam pulau yang berisi provinsi, termasuk di pulau-pulau kecil yang memiliki jumlah provinsi yang sedikit seperti Maluku, Lombok dan Bali meskipun datanya tersedia. Maka, penulis memilih Pulau Sumatera (10 provinsi) dan Pulau Jawa (6 provinsi) untuk dibandingkan. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti Tesis yang berjudul **“Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Studi Komperatif Pulau Sumatera dan Pulau Jawa)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang sebelumnya, secara teoritis dapat diasumsikan bahwa penurunan tingkat kemiskinan seharusnya memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan distribusi pendapatan. Demikian pula, peningkatan pada sektor infrastruktur, pengeluaran pemerintah, implementasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, serta pertumbuhan investasi secara bersamaan seharusnya berimplikasi terhadap penurunan nilai Indeks Gini, yang mencerminkan penyempitan tingkat ketimpangan pendapatan. Dalam kerangka teoritis pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, kondisi-kondisi tersebut dipandang sebagai faktor-faktor yang mendukung terwujudnya pemerataan hasil pembangunan.

Berdasarkan identifikasi uraian diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik ekonomi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa?
2. Apakah terdapat perbedaan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh Infrastruktur, Pengeluaran Pemerintah, Kebijakan Pemerintah, Investasi, dan Kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan peneliti melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis karakteristik ekonomi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
2. Untuk melihat perbedaan Ketimpangan Pendapatan di Sumatera dan Jawa
3. Untuk menganalisis pengaruh Infrastruktur, Pengeluaran Pemerintah, Kebijakan Pemerintah, Investasi, dan Kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis:

1. Bagi pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak seperti pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat kebijakan atau aturan dengan tujuan mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.
2. Bagi penulis
Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pengetahuan serta wawasan lebih mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.
3. Bagi pihak lain
Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan studi lebih lanjut bagi kalangan akademis yang melakukan penelitian dengan tema yang sama.